

ABSTRACT

The mutation of common people's opinion due to the public services in this present time claim the government to concern and arrange a proper and reliable system which used as agent responsibility instruments to the principal based on their ability to manage the source in the purpose to realize the nation's goals. One of the real step taken by the government was publishing Government Rule number 71 of 2010 concerning The Government Accounting System replacing Government Rule number 24 of 2005. The study aimed at finding out whether the Government Accounting System Based On Accrual Basic, Financial Accountability and The Adherence of Law Regulation affected partially as well simultaneously towards the performance accountability of government agencies in Semarang Regency, province central java.

The population in this study is all of agency known as SKPD in Semarang regency. The samples were determined based on purposive sampling technique. The respondents involved to be the sample of this study consisted of the head of planning section, the head of finance section and the treasurer as many 104 people from 47 SKPD. Data verifications were made based on validity testing and reliability testing which used Likert scale on 7 point respons. The classical assumption was made based on normality testing, multicollinearity testing, and heteroscedasticity, while the hypothesis was tested based on multiple regression analysis supported by SPSS 16.0 for windows program.

A positive value has given by multiple regression analysis as the result of the research. This indicated that both partially as well as simultaneously, there was a significant and positive effect of Government Accounting System Based On Accrual Basic, Financial Accountability and The Adherence of Law Regulation affected partially as well simultaneously towards the performance accountability of government agencies in Semarang Regency.

Keywords : The Adherence of Law Regulation, Financial Accountability, Government Accounting System Based On Accrual Basic, Performance Accountability of Government Agencies.

ABSTRAKSI

Pergeseran paradigma masyarakat terhadap manajemen publik di era sekarang ini menuntut Pemerintah untuk menyediakan suatu sistem yang handal dan terpercaya sebagai alat pertanggungjawaban agent kepada principal atas penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Langkah nyata yang telah diambil pemerintah diantaranya dengan mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, meliputi Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan sebagai instansi wajib LAKIP sebanyak 47 unit. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert dengan 7 (tujuh) titik respon. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik sedangkan pengujian hipotesis dengan metode regresi linear berganda. Proses perhitungan pengujian diolah dengan menggunakan program SPSS for windows release 16.00.

Hasil analisis secara statistik terhadap penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan atas penerapan SAP berbasis akrual (X_1), akuntabilitas keuangan (X_2), ketaatan pada peraturan perundangan (X_3) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) baik secara simultan maupun secara parsial. Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh dimana koefisien regresi bertanda positif, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan SAP berbasis akrual (X_1), akuntabilitas keuangan (X_2), ketaatan pada peraturan perundangan (X_3) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Kata kunci : *Akuntabilitas Keuangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.*